

Sekolah Harus Gratis

Kritik terhadap sistem pendidikan di negara kita

oleh Budi Prayetno

Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang identik dengan "uang". Slogan-slogan yang mengatakan bahwa "ilmu itu mahal", "mutu pendidikan sangat tergantung dari besarnya biaya yang dikeluarkan", sudah lazim dikalangan masyarakat kita. Bahkan masyarakat kita sudah menganggap hal yang lumrah jika ada seorang anak miskin yang tidak dapat mengecap pendidikan. Kenyataan ini sungguh menggelisahkan saya, tatkala saya mendengar seorang anak SD membacakan Pembukaan UUD 1945 pada suatu kegiatan Upacara Bendera di sekolahnya. Dasar Konstitusi kita tersebut mengatakan bahwa salah tujuan negara ini adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa", tetapi pada kenyataannya pendidikan hanya menjadi milik kalangan yang mempunyai modal. Timbul pertanyaan di benak saya "Apakah pendidikan di Indonesia merupakan pendidikan yang membebaskan?" Ataukah pendidikan di Indonesia semakin mengungkung cakrawala pemikiran dan membuat miskin masyarakat kecil? Kita tentunya tidak akan terlalu cepat memberi penilaian terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Saya akan mencoba menyajikan beberapa fakta agar kita bisa memberi penilaian terhadap sistem pendidikan di Indonesia.



Sistem Kapitalisme Pendidikan

Kata Kapitalisme tentunya tidak asing bagi kita. Akan tetapi jika kata kapitalisme dirangkaikan dengan kata pendidikan tentunya muncul pertanyaan dalam benak kita apakah benar sistem pendidikan kita menganut paham kapitalisme, bukankah negara kita berdasar pada paham Demokrasi Pancasila?

Sejak Komunisme runtuh, maka ide-ide tentang sosialisme menjadi kadaluarsa dan cenderung dilarang. Demokrasi Liberal menjadi kekuatan dimana dunia harus sujud di bawah pengawasan Amerika Serikat sebagai penegak Sistem Kapitalisme Modern. Sistem perekonomian diatur oleh WTO (World Trade Organization). Organisasi Perdagangan Internasional

ini memaksa ekonomi dunia dan pasar-pasar di setiap negara untuk tunduk pada dogma Kapitalisme.

Ekonomi Liberal ini memaksa semua negara untuk berpacu dalam membuka pasar dan menarik semua subsidi yang berfungsi sebagai proteksi bagi masyarakat. Kita dipaksa untuk terus-menerus berada dalam kompetisi, hal ini tentulah bukan masalah bagi negara-negara maju, yang memiliki modal raksasa. Akan tetapi dilain pihak negara-negara yang baru berkembang harus mengorbankan banyak pihak dan kompetisi-kompetisi tersebut berubah menjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Sistem ini juga memaksa kita untuk melakukan privatisasi terhadap sektor-sektor publik. Pemerintah tidak lagi berwenang, tetapi sektor swasta menjadi pemain penting. Untuk hal ini disebarkan isu ketidakmampuan negara dalam mengelola sektor publik sehingga sebaiknya diserahkan kepada sektor swasta untuk mengelolanya. Padahal belum tentu ada jaminan yang jelas tidak akan terjadinya korupsi jika sektor publik tersebut diberikan kepada swasta. Hal ini kemudian berimbas kepada sektor pendidikan, dimana pendidikan dituntut untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sedang berkompetisi dalam ekonomi liberal. Rezim Neo-Liberalisme telah menempatkan pengetahuan sebagai modal yang memiliki kekuatan uang. Ilmu Pengetahuan diukur dari nilai jualnya dan sejauh mana ia berperan dalam kompetisi pasar.

Privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan pendidikan bukan lagi milik publik dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik, melainkan milik sebagian orang atau lapisan kelas sosial tertentu (para pemilik modal). Kegagalan ataupun keberhasilan sistem pendidikan dinilai berdasarkan nilai ekonomi, dalam artian seberapa besar lulusan suatu sekolah berhasil terserap dalam lapangan pekerjaan. Evaluasi bukan lagi menyangkut metodologi yang digunakan atau kualitas pengajar, melainkan sejauh mana sebuah pelajaran atau mata kuliah dapat memberi kontribusi nyata bagi ekonomi pasar. Dengan demikian jelaslah bahwa untuk mengecap pendidikan, ada prasyarat mutlak yang sudah menjadi rahasia publik, yaitu peserta didik harus punya modal besar untuk membiayai ongkos pendidikan yang tidaklah murah karena sistem

privatisasi tadi. Semakin lengkaplah kutukan bagi si miskin dan semakin nyata bahwa pendidikan di Indonesia adalah pendidikan Kapitalisme yang memiskinkan rakyat kecil. Ingin Kaya, tapi tidak punya pekerjaan. Ingin kerja, tapi tidak sekolah. Ingin sekolah, tapi tidak bisa karena tidak punya uang. Inilah yang saya katakan kutukan bagi si miskin.

Sekolah Membuat Siswa Anarkis

Secara sepintas tentunya kita akan menyangkal bahwa tidak mungkin sekolah membuat siswa menjadi anarkis. Akan tetapi jika anda membaca Gatra edisi 25 Oktober 2003 dalam judul "Hukuman Ngawur Bu' Guru", saudara akan terkejut mendapatkan betapa konyolnya hukuman-hukuman yang diberlakukan di sekolah. Bayangkan saja jika seorang anak kelas IV SD harus terkencing-kencing dan muntah karena dipukul oleh teman-temannya yang jumlahnya 29 orang dengan mistar papan tulis. Hukuman ini diperintahkan oleh gurunya karena anak tersebut tidak bisa menghafalkan perkalian tujuh. Kalau anda belum puas, anda bisa membaca kisah tentang Penganiayaan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Bagaimana mungkin para mahasiswa yang akan menjadi panutan dalam masyarakat bertingkah seanarkis itu? Dan sedihnya lagi kejadian tersebut bukanlah yang pertama dan mungkin juga bukan yang terakhir. Jika kita belum sampai pada kesepakatan bahwa sekolah adalah tempat untuk menjadikan siswa anarkis, anda dapat melihat peristiwa-peristiwa perpeloncoan yang terjadi setiap tahun ajaran baru. Mahasiswa senior merasa berhak dan pantas untuk memberi pembinaan kepada adik-adik baru mereka. Pemukulan dan penyiksaan fisik serta mental tersebutlah yang mereka namakan sebagai pembinaan.

Jika kita bertanya siapa yang menjadi penanggung jawab dari masalah ini maka kita tentu bingung mau menuding siapa? Dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah siswa bagikan batang korek api di tangan guru dan yayasan. Yayasan sendiri bergantung kepada penguasa-penguasa yang di atasnya, antara lain Para pengusaha (Industialisasi), sampai kepada kaum militer yang mengatur jenis pelajaran dan sampai berapa lama siswa harus menempuh pendidikan. Sistem ini yang kemudian lebih kita kenal dengan istilah kurikulum. Erich Fromm¹ mengatakan bahwa sekolah cenderung mematikan perasaan tak senang siswa. Siswa tidak boleh menolak mata pelajaran dan juga memilih mata pelajaran yang disukainya. Apalagi untuk menolak apa yang diajarkan para guru. Jika siswa mencoba melanggar ketentuan ini maka sudah jelas hukuman apa yang akan menjadi ganjarannya. Emosi dalam kebanyakan sistem sekolah selalu dipisahkan dengan

sisi intelektual seseorang. Sehingga usaha untuk berfikir menjadi sebuah kegiatan yang tidak layak untuk dilakukan. Para siswa malahan harus menghafal serangkaian data-data yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan siswa, bahkan data-data tersebut cenderung tidak otentik lagi. Dampaknya bagi pelajar adalah, para siswa akan memandang kebenaran sebagai sesuatu yang relatif, tergantung siapa yang menafsirkannya, dan barangsiapa yang berani mengusut kebenaran tersebut segera akan dikenai sanksi.

Sadar atau tidak hal ini membuat para siswa menjadi tidak kritis dan hanya menjadi burung "Beo". Para siswa juga kemudian dibungkus dengan kurikulum-kurikulum yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga siswa menjadi "Raja dari Ilmu Pengetahuan", akan tetapi buta terhadap realitas masyarakat yang ada. Siswa dibiasakan menatap penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan, tanpa adanya rasa "mengamuk" dalam batinnya.

Siswa kemudian dibiasakan dengan klasifikasi-klasifikasi di dalam lingkungan sekolah, misalnya siswa bodoh dan siswa pintar, sekolah bermutu dan sekolah tidak bermutu, klasifikasi-klasifikasi ini akan membuat siswa secara tidak sadar membangun gagasan dalam dirinya untuk memperlakukan kelompok yang berbeda dengan dirinya secara berbeda. Di sekolah-sekolah tertentu, para siswanya dijadikan mesin tak berperasaan, salah satu contohnya adalah kasus STPDN, para praja tingkat 3 dengan brutal memukuli dan menganiaya adik-adiknya sampai tewas. Lebih buruknya lagi ketika para pelaku ini diinterogasi mereka hanya mengatakan "Siap!! Kami Salah". Ungkapan dingin seperti yang sering kita dengar dari mulut para tentara yang dilatih menjadi mesin pembunuh dan tanpa hati nurani.

Tidak hanya sampai disitu saja, model pembelajaran yang dilaksanakan juga mendukung para siswa menjadi anarkis. Siswa dididik untuk menjadi patuh, sopan, dan pintar. Mungkin kita bertanya apa salahnya dengan sistem ini, bukankah baik jika seseorang patuh, sopan apalagi pintar? Sayangnya yang dimaksud dengan Patuh, Sopan dan Pintar disini adalah para siswa itu harus dijadikan objek dari kebenaran-kebenaran relatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, dan dengan demikian guru adalah "sang maha tahu". Pelajaran-pelajaran yang diberikan yang disampaikan secara Verbalistik dan disempurnakan dengan literatur-literatur yang telah ditentukan, murid betul-betul hanya objek tanpa nilai dan guru adalah subjek yang akan menanamkan nilai-nilai yang menurut mereka benar. Siswa ditekan dan dibelenggu untuk mematuhi apa yang dikatakan pendidik. Pendidik lebih menjadi



pengamat ketimbang menjadi pembimbing bagi siswa, hal ini tampak dari model susunan bangku dalam ruangan kelas, dimana guru betul-betul diposisikan pada tempat yang strategis untuk menjadi pengamat atau polisi. Akibatnya siswa akan mencari tempat-tempat untuk melampiaskan ekspresinya yang terkungkung di bangku pendidikan. Salah satunya adalah berkumpul dalam geng-geng atau kelompok-kelompok yang dapat menjerumuskan mereka pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran.

Sistem Pendidikan Membuat Sekolah Menjadi Fabrik Pencetak Pengangguran

Pendidikan berasal dari bahasa latin educare, yang berarti "membawa keluar". Sekolah semestinya dijalankan dengan fungsi ini. Para siswa harus dibawa keluar untuk bersentuhan langsung dengan realitas dalam masyarakat. Sayangnya siswa lebih banyak diberi jawaban-jawaban yang definitif ketimbang memberi rangsangan kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggairahkan sehingga intelektualitas siswa dapat berkembang. Rangkaian mata pelajaran yang disusun dalam kurikulum membuat siswa terus-menerus berkutat dengan materi-materi pembelajaran, tanpa punya waktu untuk mempedulikan fakta-fakta sosial di sekitarnya. Pendidikan yang menjauhkan siswa dari realitas sosial ini telah membungkam rasa kepedulian dan daya kritis peserta didik. Guru yang memegang kendali terkadang menggunakan metode yang menutup pintu diskusi, atau sekalipun memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, biasanya dilakukan pada jam-jam akhir sehingga siswa tersebut harus mendapat tekanan batin dari teman-temannya yang ingin segera menyelesaikan jam pelajaran yang monoton tersebut. Para siswa berada dalam kondisi yang saling mengejar dead-line jadwal kurikulum, sehingga siswa tidak memiliki keberanian dan kemampuan melahirkan karya-karya yang orisinal. Lalu dampak yang paling buruk adalah para siswa tersebut begitu lulus tidak bisa langsung terjun dalam dunia kerja. Mereka menjadi sangat tergantung dan tidak mandiri karena daya kreativitas mereka telah lama mati di bangku sekolah.

Salah satu solusi yang ditawarkan kemudian adalah dengan membuat sekolah-sekolah kejuruan. Ini solusi yang cukup baik, karena para siswa betul-betul dilatih untuk terjun dalam dunia kerja, dan juga sekolah

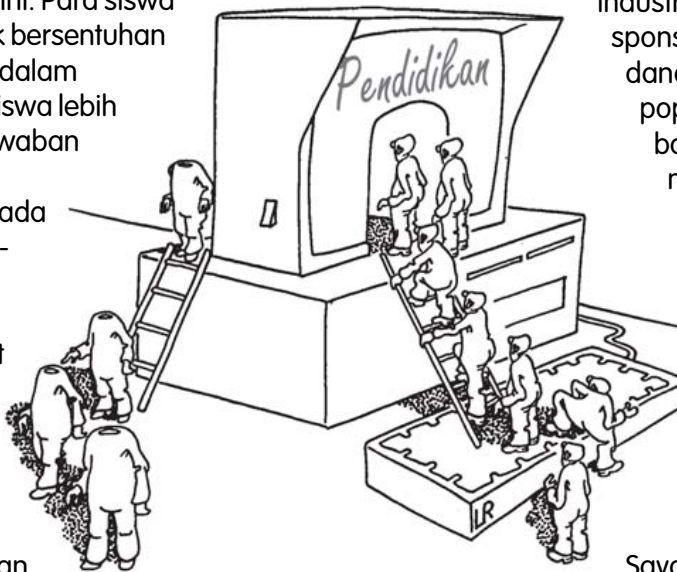
kejuruan seperti ini dapat meningkatkan lamanya waktu sekolah sehingga biaya lebih kecil. Sayangnya hal ini kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah, atau mungkin juga pemerintah sengaja tutup mata, sehingga pihak swasta segera mengambil alih pengelolaan terhadap sekolah-sekolah kejuruan. Banyak industri-industri besar yang menjadi sponsor dari sebuah sekolah kejuruan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan pasokan tenaga kerja yang murah, namun terampil bagi industri tersebut. Sayangnya para siswa tersebut tidak sadar akan hal ini, dan sekalipun mereka sadar akan eksploitasi ini mereka toh tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan tersebut. Sekolah asik-asik saja, karena dengan mengajak

industri tertentu untuk menjadi sponsor sekolahnya ia mendapat dana segar dan sekaligus popularitas, sehingga semakin banyak yang berminat untuk masuk dalam sekolah tersebut. Sungguh malang nasib para alumnus pendidikan di Indonesia, kalau bukan menjadi pengangguran, mereka akan dieksploitasi oleh kaum-kaum Kapitalis.

Sekolah dan Pendidikan Harus GRATIS !!!

Saya kira cukuplah fakta-fakta ini bagi kita untuk menuding pendidikan kita di Indonesia sebagai pendidikan yang semakin mengungkung cakrawala pemikiran dan membuat miskin masyarakat kecil. Sebenarnya di manapun negara yang pendidikannya maju, tidak ada pendidikan yang murah. Pendidikan itu Mahal². Kata-kata ini dilontarkan oleh salah seorang pejabat Diknas. Bukankah tugas pendidikan semestinya mencerdaskan dan mendewasakan anak didik? Dan bukankah tugas pejabat pendidikan untuk membuat pendidikan menjadi murah dan bisa menampung semua warga? Saya kira kita semua akan setuju bahwa negara ini akan mencapai kemerdekaan dalam arti yang seluas-luasnya jika semua rakyatnya mendapat akses dan kesempatan yang sama, terutama untuk menikmati pendidikan yang membebaskan.

Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan, apa kita hanya akan menjadi penonton dan tukang kritik dari semua masalah ini? Saya kira tidak, cobalah kita belajar dari tokoh-tokoh pemuda yang telah mengecap pendidikan pada zamannya. Douwes Dekker, Haji Ahmad Dahlan, Suwardi Suryaningrat, dan



tokoh-tokoh lainnya. Mereka tidak hanya menjadi orang-orang yang pandai tetapi mereka juga punya rasa kepekaan yang luar biasa dalam melihat kebodohan dan eksploitasi oleh penjajah terhadap anak bangsa ini. Mereka membangun sekolah-sekolah rakyat, dan membebaskan siswanya dari kebodohan yang menindas. Pemerintah kita mestinya malu terhadap Cina. Negara yang cenderung kita olok-olok ini karena sistem komunis yang diterapkannya, ternyata salah satu kebijakan negara komunis ini adalah membiayai 5.000-10.000 para mahasiswanya untuk belajar ke negara-negara Eropa setiap tahun. Kebijakan ini juga ditempuh oleh tetangga kita Malaysia yang mengirimkan 50 ribu calon doktornya untuk menempuh pendidikan ke Inggris, atau Amerika setiap tahunnya. Yang lebih radikal lagi dan semestinya menjadi cambuk bagi pemerintah kita adalah negara Kuba. Negara yang diembargo ekonominya oleh Amerika ternyata mampu menggratiskan sekolah bagi rakyatnya. Hal ini terjadi karena para pemimpinnya sadar akan pentingnya fungsi pendidikan sebagai pembebas, dan juga karena para pemimpinnya tidak hanya mengumbar janji-janji palsu mereka ketika kampanye. Lalu apa solusi yang kita tawarkan ?

Sekolah Harus GRATIS !!!

Dari mana uangnya, dari mana kita punya biaya untuk menggratiskan sekolah?

Biaya tersebut bisa didapat dengan³ :

1. Alokasi APBN sebesar 20 % yang sebenarnya sangat kecil ini, harus dialokasikan dengan benar, jangan dikorupsi lagi. Perlu ada pengawas independen untuk mengawasi distribusi anggaran ini. Dan juga dana kompensasi BBM harus segera disalurkan jangan di tahan-tahan, bukankah sudah banyak tayangan-tayangan di Televisi-televisi swasta tentang sekolah-sekolah yang hampir rubuh bahkan sudah rubuh.
2. Melakukan pemotongan gaji untuk pejabat-pejabat tinggi dan dana tersebut dialokasikan untuk pendidikan. Banyak pejabat-pejabat kita memiliki pundi-pundi pribadi melalui bisnis pribadi mereka, belum lagi tunjangan-tunjangan yang diterima mereka. Salah satu contohnya adalah tunjangan rumah dinas bagi anggota dewan yang bernilai puluhan juta per bulan per orang. Apa mereka semua belum punya rumah? Sehingga harus mendapat uang dari negara yang dipungut dari pajak rakyat untuk membeli rumah, padahal rakyat kita bodoh-bodoh dan miskin. Ini bukti ketidakpekaan para pejabat negara kita, yang terus-menerus minta difasilitasi, padahal rakyatnya bodoh-bodoh dan miskin-miskin.

3. Perusahaan-perusahaan besar harus dikenakan pajak khusus dan dana tersebut dialokasikan untuk biaya pendidikan.

4. Mengusut kasus-kasus korupsi dalam sektor pendidikan khususnya dan memberi ganjaran yang seberat-beratnya.

5. Harus ada standar baru tentang kualitas pendidikan kita, dari segi kemampuan siswa dan kreativitas siswa.

6. Melakukan pemungutan dana langsung ke masyarakat secara sukarela. Rakyat Amerika saja tetap memberi sumbangan kepada negaranya, padahal negaranya selalu memberikan pinjaman-pinjaman kepada negara-negara berkembang.

7. Mengajak semua elemen masyarakat untuk mengadakan pengawasan terhadap sistem pendidikan kita.

Semua ini tentunya hanya berupa saran saja, langkah selanjutnya adalah bagian pemerintah kita sebagai pengambil kebijakan, seandainya sistem pendidikan kita tetap tidak berubah dan hanya menjadi milik segelintir pemilik modal, maka jalan terakhir adalah melakukan revolusi.

Refleksi Theologis

Sebagai umat Kristen kita semestinya harus menjadi seperti Yesus. Bukankah Yesus telah memberikan teladan yang sangat jelas kepada kita tentang suatu model pendidikan yang membebaskan. Yesus mendidik para muridNya dengan langsung membuat mereka bersentuhan dengan realitas masyarakat. Para murid tidak dijauhkan dari realitas sosial yang ada, melainkan para murid dibuat bersentuhan langsung dengan mengutus mereka ke tengah-tengah realitas sosial. Yesus juga tidak menekan kesadaran para murid dengan mematikan kreativitas para murid, bahkan cenderung Yesus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh para murid untuk terjun langsung dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah dan membebaskan umat manusia dari kuasa dosa.

Dengan demikian, tugas kita adalah melanjutkan apa yang Yesus telah kerjakan sebelumnya. Saya sangat menyesalkan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yayasan-yayasan Kristen yang kemudian menarik pungutan-pungutan dari siswanya yang ternyata sangat memberatkan siswa tersebut, lebih parahnya lagi iuran-iuran ini ternyata tidak punya relevansi dengan mutu pendidikannya. Misalnya di salah satu sekolah Kristen, para siswanya diharuskan untuk membeli buku tulis khusus yang telah diberi lambang sekolah tersebut, katanya untuk menjaga identitas



sekolah. Apakah tanpa buku tulis tersebut yang harganya cukup mahal, para siswa tidak dapat menulis? Bukankah lebih banyak buku tulis lain yang dijual bebas dengan harga lebih terjangkau.

Belum lagi sikap gereja yang acuh-tak acuh dengan hal ini. Anggaran gereja lebih dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ritus keagamaan dan nomor dua setelah itu adalah anggaran rapat gereja. Semestinya gereja terlibat secara aktif dalam program-program nyata untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, misalnya dengan beasiswa-beasiswa.

Catatan Kaki

¹ Erich Fromm, "Mendidik si Automaton" dalam *Menggugat Pendidikan*, Pustaka Pelajar, 1997.

² *Harian Bernas*, 10 Desember 2003, hal. 2.

³ Prasetyo Eko, "Orang Miskin dilarang Sekolah", Yogyakarta: Resist Book, 2004.

Kepustakaan

Eko, Prasetyo, "Orang Miskin dilarang Sekolah" dalam *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.

Freire, Paulo, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Yogyakarta: Read & Pustaka Pelajar, 2002.

Fromm, Erich, "Mendidik si Automaton", dalam *Menggugat Pendidikan*, Pustaka Pelajar Everet, 1997.

Reimer, *Matinya Sekolah*, Jakarta: Hanindita, 2000.

Roem, Topatimasang, *Sekolah itu Candu*, Yogyakarta: Insist Press & Pustaka Pelajar, 1999.

Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan*, Yogyakarta: Insist Press, Cindelaras dan Pustaka Pelajar, 2004.

*Budi Prayetno Rante adalah mahasiswa STT INTIM
Makassar angkatan 2002*

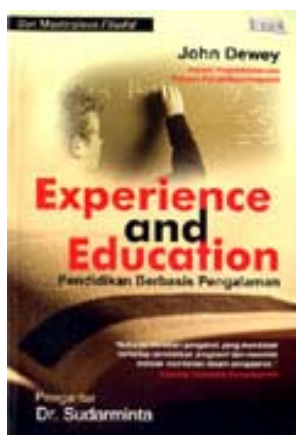
Pendidikan Berbasis Pengalaman

*Resensi buku karya John Dewey, Judul asli: Experience and Education,
New York: Collier Books. Alih bahasa: Hani'ah, penerbit TERAJU - oleh Calvin Kalambo*

"Semua pengalaman adalah jejak menuju ke arah pencaran dunia yang belum dikunjungi. Yang tepinya memudar untuk selamanya bila ia kutinggalkan."

Pengalaman adalah istilah sehari-hari yang hampir tidak memiliki keistimewaan kecuali untuk mengingatkan sesuatu yang sudah berlalu.

Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh John Dewey sejak lama, pengalaman adalah sebuah istilah kunci di dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik terkemuka pada jamannya, John Dewey telah mengemukakan banyak gagasan penting yang mencerahkan sekaligus meretas jalan kebekuan pendidikan yang tidak mendidik. Salah satu butir pemikirannya dituangkan melalui buku yang ditulisnya pada tahun 1938 dan disarikan dalam sebuah judul "Pendidikan Berbasis Pengalaman, Experience and Education. Baginya, pengalaman menjadi demikian bermakna sebab pengalaman itu jauh lebih mendalam, luas, kompleks dan bernas ketimbang pengetahuan. Pengalaman adalah basis pendidikan, sarana tetapi juga sekaligus tujuan pendidikan. Tanpa pengalaman tidak akan ada pendidikan sejati.



Tradisional versus progresivisme

John Dewey mengevaluasi dan mengkritisi berbagai fenomena dalam dunia pendidikan. Gagasannya tentang pendidikan berbasis pengalaman merupakan respon atas dua kecenderungan berlawanan masa itu, yakni aliran tradisional dan progresivisme yang muncul sebagai reaksi atasnya. Pertentangan tersebut oleh John Dewey dilihat sebagai salah satu akibat dari kecenderungan alamiah manusia yang gemar berpikir dikotomis dengan mengambil posisi yang ekstrim satu sama lain. Dalam banyak hal pikiran John Dewey dekat dengan aliran progresivisme, namun secara tegas ia juga mengkritik berbagai segi yang dianggapnya keliru.

Sepintas lalu progresivisme bisa dianggap sebagai era baru yang menawarkan gagasan dan wawasan yang dinamis bagi pendidikan. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian sebab progresivisme dibangun bukan atas dasar sebuah filsafat yang konstruktif demi sesuatu yang positif, melainkan prinsip kritik negatif yang pada gilirannya memunculkan kesulitan baru bagi pendidikan. Solusi yang ditawarkan hanya demi sebuah penolakan terhadap tradisionalisme itu, bukan sebuah gerakan yang vital dan eksistensial bagi pendidikan. Kritik terhadap pola lama yang menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang sudah selesai dan siap pakai dalam semua situasi tidak dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan hakikat pendidikan menurut filsafat

